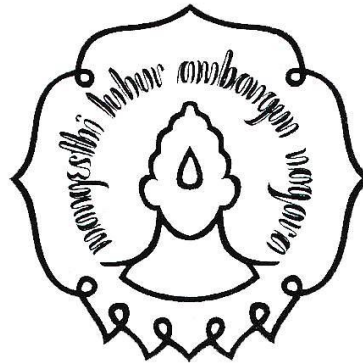


**URGENSI PEMBENTUKAN
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA TIMUR-BARAT
(ANALISIS BERDASARKAN ARTIKEL 53 UNCLOS 1982)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat
Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta**

Oleh :
Eriec Firman
NIM. E 0010133

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**URGENSI PEMBENTUKAN
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA TIMUR-BARAT
(ANALISIS BERDASARKAN ARTIKEL 53 UNCLOS 1982)**

Oleh
Eriec Firman
NIM. E0010133

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 1 Maret 2017

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum.
NIP. 19591125 19860 1 2001

Pembimbing II



Anugrah Adiastuti, S.H., M.H.
NIP. 19850629 20091 2 2002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

URGENSI PEMBENTUKAN

**ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA TIMUR-BARAT
(ANALISIS BERDASARKAN ARTIKEL 53 UNCLOS 1982)**

Disusun Oleh:

Eriec Firman

NIM. E0010133

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Maret 2017

DEWAN PENGUJI

1. Siti Muslimah, S.H. M.H. :
NIP. 197009261994032001
Ketua
2. Anugrah Adiastuti, S.H., M.H. :
NIP. 198506292009122002
Sekretaris
3. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. :
NIP. 195911251986012001
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196011071986011001



PERNYATAAN

Nama : Ericc Firman

NIM : E 0010133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**URGENSI PEMBENTUKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
TIMUR-BARAT (ANALISIS BERDASARKAN ARTIKEL 53 UNCLOS
1982)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam
penulisan hukum ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)
dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 1 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



Ericc Firman

NIM. E0010133

ABSTRAK

Eriec Firman. 2015. E00101233. URGENSI PEMBENTUKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA TIMUR-BARAT (ANALISIS BERDASARKAN ARTIKEL 53 UNCLOS 1982). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terhadap hal, pertama adalah bagaimana implementasi normatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap ketentuan artikel 53 United Nations Conference of The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, menganalisis bagaimanakah urgensi pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) rute Timur-Barat jika akan diterapkan dan diberlakukan di Indonesia.

Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah dan dokumen lain yang mendukung serta dikumpulkan pula melalui pengumpulan bahan hukum yang berbasis elektronik seperti melalui internet. Bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganalisis berdasarkan pengajuan premis mayor dan premis minor.

Berdasarkan pada pembahasan, hasil penelitian menunjukkan simpulan bahwa Indonesia telah secara tegas mengimplementasikan ketentuan artikel 53 UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia walaupun pengaturan tersebut lebih bersifat pada pemahaman bahwa penentuan alur laut kepulauan yang ada dan ditetapkan di Indonesia merupakan alur laut kepulauan yang sudah lengkap. Hasil penelitian juga menunjukkan dibutuhkan suatu pemenuhan jalur alur laut kepulauan di Indonesia dengan pengimplementasian ALKI rute Timur-Barat.

Kata kunci: Alur Laut Kepulauan, Alur Laut Kepulauan Indonesia, UNCLOS 1982

ABSTRACT

Eriec Firman. 2015. E00101233. *THE URGENCY OF THE DESIGNATION OF INDONESIAN ARCHIPELAGIC SEA LANE EAST-WEST ROUTE (ANALYSIS BASED ON THE ARTICLE 53 OF UNCLOS 1982)*. Law Writing (Thesis). Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to describes and determines the problems of, the first is how is the normative implementation committed in Indonesia's regulation act that come into force by now to the provisions of article 53 of UNCLOS 1982. The second purpose is to analyze how is the urgency of forming an East-West route of Indonesia Archipelagic Sea Lane if it will be designated and implemented in Indonesia.

This research is a normative legal research, that is prescriptive which using legal materials as the source, either in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Further legal material collection techniques in this research is using the literature studies by collecting the legal materials derives from the statutes, books, scientific law articles and other relevant documents and also collects the legal materials by using electronic based material, such as internet. Furthermore, those legal materials be treated and analyzed and had been used to answers the studied issues. In addition, this research used analytical technique which is using deductive syllogism analyzed technique with the submission of major and minor premise.

Based on this research, the conclusions of the research showed that Indonesia has firmly implement the provisons of article 53 of UNCLOS 1982 in the applicable regulation in Indonesia, although those arrangements are largely understand as the Indonesian Archipelagic Sea Lanes that has been determined is a fully designation sea lanes commencement. This research conclusion also showed that Indonesia still needs to complete the designation of Indonesia archipelagic sea lanes which would be completed through the designation of the East-West route of the Indonesia archipelagic sea lanes.

Keywords: *Archipelagic Sea Lane, Indonesia Archipelagic Sea Lane, UNCLOS 1982*

MOTTO

“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu...”
(QS.:Ghafir (40: 60))

Tidak Pernah Terlalu Lambat Untuk Memulai Mengerjakan Hal Baik (Anonim)

“Karena Proses Tak Akan Pernah Mengkhianati Hasil” (Anonim)

PERSEMBAHAN

Mahakarya dan buah dari kristalisasi pemikiran selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan nikmat dan syafaat yang tak terhitung bagi penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini; Semoga apa yang penulis kerjakan dapat dicatat sebagai ibadah dan persembahan kepada-Nya.
- Bapak George Apituley dan Ibu Dewi Umiyati, dan Carlo Geordie Balinda kedua orangtua penulis serta kakak penulis, keluarga tercinta yang senantiasa tanpa mengenal lelah memberi cinta, kasih sayang, dan makna kehidupan serta selalu memberikan semangat dan dorongan guna mendukung proses belajar dan pendewasaan penulis;
- Seluruh teman dan kerabat penulis yang telah memberi begitu banyak warna kehidupan bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, dan tak lupa karya ini juga saya persembahkan bagi;
- Diri penulis sendiri.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang berjudul **“URGensi PEMBENTUKAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA TIMUR-BARAT (ANALISIS BERDASARKAN ARTIKEL 53 UNCLOS 1982)”**.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan moril maupun materiil yang diberikan kepada penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta semangat pada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, beribu terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan pengetahuan penulis melalui penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang menjadi “orang tua akademis” penulis yang selama ini telah memberikan saran dan arahan bagi penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum., selaku pengajar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta pembimbing skripsi dan bertindak sebagai seorang ibu bagi penulis dan rekan-rekan penulis, yang selalu memberikan arahan dan wejangan baik dalam penulisan skripsi maupun dalam kehidupan kepada penulis selama penulis mengenyam bangku perkuliahan.

4. Ibu Anugrah Adiastuti, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan serta berbagai masukan, arahan serta pengalaman yang dimilikinya yang diberikan bagi penulis.
5. Ibu Siti Muslimah, S.H., M.H., Ibu Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.H., LL.M., serta Ibu Sasmini, S.H., LL.M., yang telah memberikan berbagai kesempatan bagi penulis dalam pengembangan dan pembelajaran penulis.
6. Ketua Pengelola Penulisan Hukum, serta para pengelola PPH FH UNS yang telah menyetujui usulan penelitian penulis serta membantu penulis dalam mengikuti berbagai prosedur terkait penulisan hukum yang penulis lakukan.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta berbagai nasihat, wejangan, dan pengalaman yang berharga kepada penulis.
8. Mita Dwi Puspa, Farrah Fathiyah, Aldi Naradwipa S, Resha Pramana W, Asmarani Sri H, serta Sarah Amedea KD yang selalu ada dan menemani penulis dalam canda, tawa, suka maupun duka.
9. Anggie Herwanlistanto, Ilham Aji Pangestu, Yudhistira Permana, Luthfi Nur A, Ramadhan Abdillah, Gerry Kurniawan, M Asad Firdaus, Delia Intan, Sugiono, serta Bintang Ramadhan yang telah menjadi teman terbaik serta keluarga bagi penulis, yang telah serta berbagi pengalaman hidup selama penulis tinggal dan mengenyam pendidikan di Surakarta.
10. Teman-teman penulis di International Law Community, Hapis, Indira, Monica Kristianti, Monica Ayu, Irma, Yuni, Dedi, Neza, Devi, Ipunk, Yus, Ranggi, Manda serta teman-teman ILC yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu sebagai keluarga, teman belajar, teman seperjuangan, serta teman berpetualang penulis.

11. Untuk semua teman-teman penulis di fakultas maupun universitas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan warna dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar perkuliahan penulis.
12. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu dan mendukung kegiatan perkuliahan penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Karya tulis ini Penulis dedikasikan juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dan mendapatkan gelar strata satu bagi penulis.

“Tak ada gading yang tak retak”, penulis sadar bahwa isi makalah ini tidak terlepas dari kekurangan ataupun kekeliruan didalamnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap adanya saran dan masukan yang membangun serta bersifat penyempurna skripsi ini, yang akan penulis terima dengan senang hati disertai ucapan terima kasih. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam ilmu pengetahuan serta dapat berguna bagi semua pihak yang membaca ataupun mempelajarinya.

Surakarta, 1 Maret 2017

Eriec Firman

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Negara Kepulauan	15
a. Pengertian Negara Kepulauan	15
b. Status Hukum Negara Kepulauan	16
c. Kedaulatan Negara Kepulauan di Perairan Kepulauan	18
2. Kedaulatan dan Yuridiksi Negara Kepulauan	20

a. Hakikat Kedaulatan Negara	20
b. Pengertian dan Konsep Yurisdiksi.....	24
3. Regim Lintas di Perairan Indonesia	25
a. Hak Lintas Damai (<i>Innocent Passage</i>).....	25
b. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan (<i>Archipelagic Sea Lanes Passage</i>).....	27
c. Hak Lintas Transit	28
4. Alur Laut Kepulauan Indonesia.....	29
5. Perjanjian Internasional	30
B. Kerangka Pemikiran	34

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Ketentuan Artikel 53 <i>United Nations Convention On The Law of The Sea</i> 1982 di Indonesia.....	37
1. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Conventions On The Law of The Sea</i> 1982 Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	39
1.1. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Convention On The Law of The; Sea</i> 1982 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Conventions On The Law Of The Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)	39
1.2. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Conventions On The Law of The Sea</i> 1982 Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	40
1.3. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Conventions On The Law of The Sea</i> 1982 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.....	44
1.4. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Conventions On The Law of The Sea</i> 1982 Dalam Peraturan Pemerintah	

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia	46
1.5. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Conventions On The Law of The Sea 1982</i> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan	48
1.6. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Conventions On The Law of The Sea 1982</i> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian	50
1.7. Pengaturan Artikel 53 <i>United Nations Conventions On The Law of The Sea 1982</i> Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur-Pelayaran Di Laut.....	52
 B. Urgensi Pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia Rute Timur-Barat Berdasarkan UNCLOS 1982.....	56
1. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia.....	56
a. Sejarah Perkembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia.....	56
b. Tempat Pelaksanaan Lintas Alur Laut Kepulauan di Indonesia	70
c. Tata Cara Dalam Menikmati Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia	72
2. Wacana Pembentukan Rute Timur-Barat Alur Laut Kepulauan Indonesia	84
a. Potensi Ancaman di Laut Indonesia	84

b. Proyeksi Alur Laut Kepulauan Indonesia Rute Timur-Barat.....	91
c. Urgensi Pembentukan Rute Timur-Barat Alur Laut Kepulauan Indonesia.....	95
 BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan	103
B. Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA	105

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tabel Perbedaan Negara Pantai dengan Negara Kepulauan	17
Tabel 2. Tabel Implementasi Ketentuan Artikel 53 UNCLOS dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia....	41
Tabel 3. Tabel Implementasi Ketentuan Artikel 53 UNCLOS dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	45
Tabel 4. Tabel Implementasi Ketentuan Artikel 53 UNCLOS dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002	46
Tabel 5. Tabel Implementasi Ketentuan Artikel 53 UNCLOS dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002	48
Tabel 6. Implementasi Ketentuan Artikel 53 UNCLOS 1982 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.....	51
Tabel 7. Tabel Implementasi Ketentuan Artikel 53 UNCLOS dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 201.....	54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia	37
Gambar 3. Ilustrasi ALKI yang dihasilkan pada Forum Strategi TNI-AL	58
Gambar 4. Ilustrasi ALKI yang dihasilkan Rakernas Cisarua tahun 1996	59
Gambar 5. Alur laut kepulauan yang diusulkan Amerika Serikat di Bandung, Maret 1996	61
Gambar 6. Alur Laut Kepulauan yang diusulkan Asutralia di Jakarta, April 1996	62
Gambar 7. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang diadopsi oleh IMO	68
Gambar 8. Alur Laut Kepulauan Indonesia	70
Gambar 9. Ilustrasi Proyeksi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Rute Timur-Barat dari Berbagai Sudut Pandang	93
Gambar 10. Ilustrasi Proyeksi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Rute Timur-Barat.....	94